

**PELAPORAN MANAJEMAN RESIKO TAHUN 2025
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Daendles No 04 Brondong, Lamongan, Jawa Timur 62263
Telepon (0322) 661150 E-mail: brondong@lamongan.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id/brondong



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Daendels No. 04 Brondong Kode Pos 62263
Telp. (0322) 661150 e-mail brondong@lamongankab.go.id.
website:www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	900 / 56 / 413.307/2025
TANGGAL TERBIT	:	31 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan  LUTFI RIZKI ROSYADI, SE NIP.19891013 202012 1 005
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan  NURUL KHUMAI DAH,SH.M.M NIP. 1971080720001122002
Disahkan Oleh	:	Camat Brondong Kabupaten Lamongan  Drs. MOCH MACHFUD, M.M NIP. 19670114 199303 1 015

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan

lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah

Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.307/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

III. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendali

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. Hasil Identifikasi Resiko

identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian- kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Brondong

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Pemilik Risiko Fraud	Pemilik Risiko Kemitraan
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
	Resiko Strategis OPD										
1	NILAI SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO .25.99.39.01	CAMAT	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Brondong	Camat	Camat
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO. 25.99.39.02	CAMAT	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam Pembangunan Desa	Internal	C	Tidak Ada Desa Naik Kelas	Desa dan Kecamatan Brondong	Camat	Camat

Tabel 2
Kertas Kerja Operasional OPD
Kecamatan Brondong

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Pemilik Resiko Fraud	Pemilik Resiko Kemitraan
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan	ROO. 25.99.39.01	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Kurangnya Personil	Internal	C	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah tidak memenuhi target	Kecamatan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Keuangan	Bagian Organisasi, BPKAD dan Inspektorat
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan alat/bahan kegiatan kator tidak terpenuhi	ROO. 25.99.39.02	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidaka tertib administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Internal	C	Keterlambatan Penyediaan Barang Logistik Kecamatan	Kecamatan/ Masyarakat	Kasubag Umum & Kepegawaian	
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai IKM	pelaksanaan	Target IKM tidak memenuhi target	ROO. 25.99.39.03	Kasi Pelayanan Publik	Pelayanan tidak sesuai Standard pelayanan minimal	Internal	C	Masyarakat tidak puas akan pelayanan di Kecamatan Brondong	masyarakatt	Kasi Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
4	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawan pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Desa	Pelaksanaan	Terjadi penyelewengan anggaran Desa	ROO. 25.99.39.03	Kasi PPM	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Desa	Internal	C	Akuntabilitas yang lemah membuat perangkat desa tidak bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.	masyarakat	Kasi PPM	Inspektorat, Dinas PMD & Kecamatan Brondong

C. Hasil Analisis Resiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian risiko (RTP)

Tabel 3
Resiko Strategis OPD

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Resiko	Pemilik Resiko Fraud	Pemilik Risiko Kemitraan
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
Resiko Strategis OPD												
1	NILAI SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO .25.99.39.01	Camat	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Brondong	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	Camat	Camat
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO. 25.99.39.02	Camat	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa	Internal	C	Tidak Ada Desa Naik Kelas	Desa dan Kecamatan Brondong	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	Camat	Camat

Tabel 4
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Pemilik Risiko Fraud	Pemilik Risiko Kemitraan
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan	ROO. 25.99.39.01	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Kurangnya Personil	Internal	C	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah tidak memenuhi target	Kecamatan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Keuangan	Bagian Organisasi, BPKAD, Bappelitbangda dan Inspektorat
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan alat/bahan kegiatan kator tidak terpenuhi	ROO. 25.99.39.02	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terjadi Penyelewengan Anggaran	Internal	C	Keterlambatan Penyediaan Barang Logistik Kecamatan	Kecamatan/ Masyarakat	Kasubag Umum & Kepegawaian	Inspektorat BPKAD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai IKM	pelaksanaan	IKM tidak memenuhi target	ROO. 25.99.39.03	Kasi Pelayanan Publik	Pelayanan tidak sesuai Standard pelayanan minimal	Internal	C	Masyarakat tidak puas akan pelayanan di Kecamatan Brondong	masyarakatt	Kasi Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
4	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawan pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Desa	Pelaksanaan	Terjadi penyelewengan anggaran Desa	ROO. 25.99.39.03	Kasi PPM	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Desa	Internal	C	Akuntabilitas yang lemah membuat perangkat desa tidak bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.	masyarakat	Kasi PPM	Inspektorat, Dinas PMD & Kecamatan Brondong

D. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Brondong pelaksaannya pengendaliannya sebagai langkah strategis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Pengendalian yang sudah dilaksanakan

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:							
1	Penurunan Nilai Sakip Kecamatan	RSO.25.99.39.01	Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pelaksanaan Kinerja Kecamatan Brondong serta Melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kurang Kompeten SDM Aparatur	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Camat	Januari s/d Desember 2025
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami penurunan	RSO.25.99.39.02	Peningkatan Intensitas Pendampingan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Camat	Januari s/d Desember 2025

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.99.39.01	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kosongnya Jabatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari s/d Desember 2025
2	Penyediaan alat/bahan kegiatan kator tidak terpenuhi	ROO.25.99.39.02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasi an	Monitoring Rencana Umum Pengadaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s/d Desember 2025
3	IKM tidak memenuhi target	ROO.25.99.39.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurangnya Personil Staf seksi Pelayanan Publik	Pembentukan Tim Kerja	Kasi Pelayanan Publik	Januari 2025
4	Terjadi penyelewengan anggaran Desa	ROO.25.99.39.04	Pembinaan dan Pengawasan anggaran Desa secara berkala	Kurangnya partisipasi unsur kelembagaan Desa dalam pengendalian anggaran Desa	Pembentukan Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasi PPM	Januari s/d Desember 2025

E. Pengendalian yang di butuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 6
Pengendalian yang dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:				
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:				
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2025
2	Monitoring Rencana Umum Pengadaan	Penyusunan dokumen pengadaan barjas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s/d Maret 2025
3	Pembentukan Tim Kerja	Menyusun Standar Pelayanan Minimal, Inovasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari 2025
4	Pembentukan Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	SK Tim Kerja Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	Kasi PPM	Januari s/d Desember 2025

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Pada bab in berisi rancangan informasi dan komunikasi yang di butuhkan agar pihak pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

Tabel 7
Pengkommunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:					
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Brondong	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Desa/Kelurahan Kecamatan Brondong	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:					
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Maret, Juni, Oktober dan Desember 2025
2	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan secara tepat waktu	Penyusunan dokumen pengadaan barjas secara akuntabel	Rapat Koordinasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jan s/d Maret 2025
3	Pembentukan Tim Kerja	Pembentukan Tim Kerja , Menyusun Standar Pelayanan Minimal, Inovasi	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Jan sd Des 2025
4	Pembentukan Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	SK Tim Kerja Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Jan sd Des 2025

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 8
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:						
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	-
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:						
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	-
2	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan secara tepat waktu	Monitoring Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa secara berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	-
3	Pembentukan Tim Kerja	SK dilakukan monitoring secara berkala	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	-
4	Pembentukan Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	SK Tim Kerja Tim Kerja dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	

VI. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Brondong.



Drs. MOCH. MAHFUD, M.M.
Korwil Tk. I
NIP. 19670414 199303 1 015